

## PERAN G20 DALAM MENINGKATKAN KONTRIBUSI UMKM PEREMPUAN SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI BERKELANJUTAN

Mahardiva Arhaami Napinsi<sup>1\*</sup>, Rangga Hardja Kusumah<sup>2</sup>, Janice Bintang Latue<sup>3</sup>, Aldo Hanky Fernando<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Telkom

\*[Mahardivaarhaami@gmail.com](mailto:Mahardivaarhaami@gmail.com)

### Abstract

*The empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) led by women in Indonesia is a crucial aspect of the national economy, considering that MSMEs contribute up to 61.07% of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP). This study aims to analyze the role of the G20 (Group of Twenty) in supporting the empowerment of women-led MSMEs through various global initiatives such as G20 Empower. The research employs a qualitative approach using a literature review method, relying on relevant written sources to examine the impact of international policies on women-led MSMEs in Indonesia. The findings indicate that the G20, through inclusive policies and funding mechanisms, has made a positive contribution to improving access to financing and the development of women-led MSMEs. Furthermore, digitalization emerges as a key factor in strengthening the competitiveness of women-led MSMEs in the global market. However, the digital divide in remote areas and bureaucratic challenges in accessing financial services remain major obstacles. This study suggests the importance of cross-sector collaboration to create a more inclusive ecosystem that supports the sustainable growth of women-led MSMEs.*

**Keywords :** *Women-led MSMEs, G20, Economic Empowerment, Digitalization, Financial Inclusion*

### Abstrak

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan di Indonesia menjadi aspek penting dalam perekonomian nasional, mengingat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia yang mencapai 61,07%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran G20 (*Group of Twenty*) dalam mendukung pemberdayaan UMKM perempuan melalui berbagai inisiatif global seperti *G20 Empower*. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur, yang mengandalkan sumber-sumber tertulis yang relevan untuk mengkaji dampak kebijakan internasional terhadap UMKM perempuan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa G20, melalui kebijakan inklusif dan pendanaan, memberi kontribusi positif terhadap peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan UMKM perempuan. Selain itu, digitalisasi menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat daya saing UMKM perempuan di pasar global. Namun, kesenjangan akses internet di daerah terpencil dan tantangan birokrasi dalam mengakses layanan pembiayaan tetap menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyarankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan UMKM perempuan secara berkelanjutan.

**Kata kunci :** *UMKM Perempuan, G20, Pemberdayaan Ekonomi, Digitalisasi, Inklusi Keuangan*

## Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan yang terus berkembang, baik dari segi jumlah penduduk maupun pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam kedua aspek tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam menganalisis pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah. Dalam perjalanannya, Indonesia sendiri menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi, seperti fluktuasi pasar global, kesenjangan ekonomi, serta dampak pandemi yang sempat memperlambat laju pertumbuhan nasional. Namun demikian, ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga, salah satunya berkat peran besar sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan strategi penting dalam menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional (Ningsih, Nursini, & Sabir, 2023).

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 mendefinisikan UMKM sebagai usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan dengan kriteria tertentu. Sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional, peran UMKM juga ditegaskan dalam Pasal 2 dan 3 yang menyatakan bahwa UMKM tidak hanya berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk terus berkembang guna memperkuat struktur ekonomi nasional. Prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan menjadi dasar dalam pengembangan UMKM, sehingga dapat menciptakan keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, meningkatkan daya saing nasional, serta membuka peluang kerja yang lebih luas (Arliman, 2017).

Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau serta keberagaman budaya, etnis, dan sumber daya alam. Dengan luas wilayah sekitar 1,9 juta km<sup>2</sup>, Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 270 juta penduduk juga menjadikannya negara dengan populasi terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,9 juta jiwa yang terdiri dari 140,8 juta laki-laki dan 137,9 juta perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan, proporsi kedua kelompok tetap relatif seimbang (Brillianty, 2023).

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2023

| Kelompok Umur | Laki-laki (Ribuan) | Perempuan (Ribuan) | Jumlah  |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| 0-4           | 11499,3            | 11012,6            | 22511,8 |
| 5-9           | 11237,6            | 10762,4            | 22000,1 |
| 10-14         | 11316,5            | 10746,7            | 22063,2 |
| 15-19         | 11419,7            | 10714,6            | 22134,4 |
| 20-24         | 11489,7            | 10871,1            | 22360,9 |
| 25-29         | 11509,1            | 10986,4            | 22495,6 |
| 30-34         | 11243,9            | 10845,1            | 22089   |

|       |          |          |          |
|-------|----------|----------|----------|
| 35-39 | 10834,1  | 10570,3  | 21404,5  |
| 40-44 | 10274,3  | 10130,8  | 20405,5  |
| 45-49 | 9544,2   | 9514,7   | 19058,9  |
| 50-54 | 8415     | 8450,9   | 16865,9  |
| 55-59 | 7133,3   | 7231,3   | 14364,6  |
| 60-64 | 5676,6   | 5813,7   | 11490,3  |
| 65-69 | 4183,9   | 4344,5   | 8528,4   |
| 70-74 | 2695,1   | 2920,6   | 5615,8   |
| 75+   | 2314,2   | 2993,5   | 5307,7   |
| Total | 140786,8 | 137909,4 | 278696,2 |

Distribusi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi populasi dengan jumlah lebih dari 60% dari total penduduk. Sementara itu, kelompok usia muda (0-14 tahun) masih cukup besar, mencerminkan potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade ke depan. Di sisi lain, jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) juga mulai meningkat yang menandakan adanya pergeseran demografi yang memerlukan perhatian terhadap kebijakan kesejahteraan lansia.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam ekonomi sangat penting, mengingat jumlahnya yang hampir setara dengan laki-laki. Hal ini menjadi dasar kuat bagi kebijakan pemberdayaan perempuan, terutama dalam sektor ekonomi dan ketenagakerjaan agar mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan. Dalam situasi internasional, Indonesia terus berupaya memperkuat posisinya dalam kerja sama ekonomi global melalui berbagai forum internasional, salah satunya adalah Presidensi G20 (Group of Twenty) tahun 2022 (Astuti & Fathun, 2020). G20 sendiri adalah "Forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (UE)".

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 2, disebutkan bahwa salah satu tujuan program Road to G20 Indonesia 2022 adalah mempromosikan ketahanan ekonomi nasional serta mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia sebagai respons terhadap pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sementara pilar utama ketahanan ekonomi nasional berfokus kepada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama yang dikelola oleh perempuan, mengingat peran strategisnya dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan yang telah diinisiasi dalam forum internasional ini perlu dikaji lebih lanjut guna memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar mampu meningkatkan daya saing UMKM serta membuka peluang bagi perempuan untuk berkembang di sektor ekonomi.

Sejalan dengan itu, G20 sendiri memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan UMKM perempuan di Indonesia, baik melalui kebijakan, regulasi, maupun program yang diinisiasi. Dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang telah diterapkan, khususnya dalam mendukung perempuan pelaku UMKM agar

dapat lebih berdaya dan memiliki akses yang lebih luas terhadap berbagai sumber daya ekonomi. Selain itu, strategi yang optimal dalam mendukung pertumbuhan UMKM perempuan melalui inisiatif G20 juga perlu dirumuskan guna memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur atau yang dikenal juga sebagai studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, peneliti mengandalkan informasi dan mengumpulkan data dengan menelaah berbagai sumber tertulis, baik dalam bentuk buku, laporan hasil penelitian terdahulu, ensiklopedia, maupun sumber-sumber lain yang terpercaya, baik dalam format cetak maupun digital yang relevan dengan objek penelitian. Metode analisis kualitatif dalam penelitian ini menekankan pada pemahaman suatu fenomena secara mendalam. Penelitian dilakukan dengan membahas masalah secara faktual dan terperinci. Tujuan dari metodologi penelitian ini bukan untuk menghasilkan generalisasi, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hasil yang diperoleh dapat berfungsi sebagai kategori substantif dan hipotesis. Secara keseluruhan, peneliti mengandalkan buku, jurnal, serta kajian pustaka yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait peran G20 dalam mendukung pemberdayaan UMKM serta efektivitasnya dalam meningkatkan daya saing UMKM dan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini juga menganalisis mengenai strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kontribusi UMKM perempuan melalui inisiatif G20 (Nadirah, Pramana, & Zari, 2022; Purwanza, 2022; Subhaktiyasa, 2024; Suprayitno, Ahmad, Tartila, & Aladdin, 2024).

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran G20 dalam mendorong pemberdayaan UMKM perempuan di Indonesia cukup signifikan melalui berbagai inisiatif global, salah satunya adalah *G20 Empower*. Program ini difokuskan pada percepatan peningkatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam sektor swasta dengan tujuan menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih inklusif dan membuka akses yang setara terhadap peluang ekonomi. Di Indonesia, keberadaan UMKM perempuan menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap keseluruhan pelaku UMKM. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 61,07% atau setara dengan Rp8.573,89 triliun. Selain itu, sektor UMKM juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang 60,4% terhadap total investasi. Temuan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan dukungan terhadap UMKM perempuan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dukungan G20 terhadap UMKM juga diwujudkan melalui kebijakan akses keuangan dan program-program pendanaan inklusif. Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 17,8 miliar dolar AS untuk memfasilitasi

pembiayaan UMKM, termasuk melalui program Usaha Mikro Produktif yang memperoleh alokasi sebesar 1,1 miliar dolar AS. Program ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku usaha perempuan yang selama ini menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan konvensional. Hasil analisis menunjukkan bahwa inisiatif ini memberi dampak positif terhadap perluasan basis pembiayaan usaha kecil dan mendorong peningkatan kemandirian ekonomi.

Sementara itu, perkembangan infrastruktur digital juga menjadi aspek penting dalam peningkatan daya saing UMKM perempuan. Tren penetrasi internet yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa digitalisasi membuka peluang besar bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024.

**Tabel 2.** Tingkat Penetrasi Internet di Indonesia

| <b>Tahun</b> | <b>Jumlah Pengguna Internet (Jiwa)</b> | <b>Total Populasi (Jiwa)</b> | <b>Tingkat Penetrasi Internet (%)</b> |
|--------------|--|------------------------------|---------------------------------------|
| 2018         | 171.176.716                            | 264.162.000                  | 64,8                                  |
| 2020         | 196.714.070                            | 266.911.900                  | 73,7                                  |
| 2021         | 202.350.000                            | 270.203.900                  | 76,8                                  |
| 2022         | 210.026.769                            | 272.682.600                  | 77,01                                 |
| 2023         | 217.030.000                            | 278.696.200                  | 78,19                                 |
| 2024         | 221.563.479                            | 278.696.200                  | 79,5                                  |

Peningkatan akses internet ini secara langsung mendukung transformasi digital UMKM, terutama melalui platform e-commerce dan layanan fintech yang memungkinkan efisiensi operasional serta perluasan akses pasar. Akan tetapi, disparitas digital antara wilayah urban dan rural masih menjadi tantangan utama, terutama bagi pelaku usaha perempuan yang tinggal di daerah terpencil.

Selanjutnya, efektivitas regulasi yang didorong oleh G20 juga tercermin dari implementasi kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk mendukung pemberdayaan perempuan. Data menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, namun representasi mereka dalam posisi strategis perusahaan seperti direksi dan manajemen senior masih relatif rendah. Berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skema yang lebih inklusif serta pelatihan kewirausahaan berbasis gender telah diterapkan untuk menjawab tantangan tersebut. Namun demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terkendala oleh birokrasi dan keterbatasan pemanfaatan informasi di tingkat pelaku usaha.

Dalam upaya meningkatkan kontribusi UMKM perempuan, strategi optimal melalui inisiatif G20 menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, terutama dalam aspek permodalan dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan non-bank, serta perusahaan fintech

memiliki potensi besar dalam memperluas akses pembiayaan yang fleksibel. Di era digital, kemitraan dengan marketplace global dan penyedia layanan pembayaran digital menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas adaptasi UMKM perempuan terhadap perkembangan teknologi. Lebih jauh dari itu, integrasi UMKM perempuan dalam rantai pasok global perlu diperkuat melalui pelatihan ekspor, sertifikasi produk, serta program inkubasi bisnis. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan antara sektor publik dan swasta dalam menciptakan ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM perempuan secara inklusif dan berkelanjutan.

## **Pembahasan**

Pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM di Indonesia merupakan bagian dari upaya besar untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, pemberdayaan perempuan dalam dunia usaha di Indonesia semakin menjadi isu yang strategis. Penelitian ini menunjukkan bahwa G20 melalui program G20 Empower, sebagai salah satu inisiatif global memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan peran perempuan dalam sektor UMKM. Hal ini sangat relevan dengan teori pemberdayaan ekonomi yang dipaparkan oleh (Kabeer, 1999) yang menekankan pentingnya memberikan perempuan akses kepada sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. G20 Empower bertujuan untuk memfasilitasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor swasta melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan, serta akses pembiayaan yang lebih inklusif. Pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, mengingat kontribusi signifikan UMKM terhadap PDB Indonesia dan penyerapan tenaga kerja.

Keberadaan perempuan sebagai pelaku utama dalam sektor UMKM di Indonesia, dengan kontribusinya yang lebih dari 60% terhadap keseluruhan UMKM, memberikan gambaran betapa besar potensi yang dimiliki oleh perempuan dalam pembangunan ekonomi. Hasil penelitian juga konsisten dengan data yang diungkapkan oleh (Beck & Demirguc-Kunt, 2006) yang menyatakan bahwa keberadaan UMKM di negara berkembang memiliki dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian sangat signifikan, tantangan yang dihadapi oleh perempuan pelaku UMKM tidak dapat dianggap remeh. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakmampuan untuk mengakses modal dan layanan keuangan yang diperlukan untuk pengembangan usaha mereka. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa pada tahun 2022, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 17,8 miliar dolar AS untuk pembiayaan UMKM dengan bagian untuk program Usaha Mikro Produktif sebesar 1,1 miliar dolar AS. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha perempuan yang selama ini menghadapi tantangan dalam mengakses layanan pembiayaan konvensional. Meskipun demikian, dengan adanya alokasi dana yang signifikan,

proses implementasi kebijakan ini masih mengalami hambatan, terutama terkait dengan birokrasi yang rumit dan keterbatasan pemahaman tentang produk keuangan yang ada.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah pentingnya akses keuangan yang lebih fleksibel dan inklusif untuk mendorong pertumbuhan UMKM perempuan. Hal ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh (Lusardi & Mitchell, 2014) yang menekankan pentingnya literasi keuangan bagi pelaku usaha dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan yang tersedia. Literasi keuangan yang rendah di kalangan pelaku UMKM perempuan, terutama di daerah terpencil, memperburuk ketimpangan ekonomi dan membatasi akses mereka terhadap peluang yang lebih luas dalam hal pembiayaan usaha. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada literasi keuangan sangat penting agar perempuan dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh kebijakan dan program pembiayaan yang ada. Salah satu solusinya adalah dengan memperkenalkan program pelatihan keuangan berbasis teknologi yang dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha perempuan di daerah yang selama ini terpinggirkan.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi dan transformasi teknologi memiliki potensi besar dalam mendorong daya saing UMKM perempuan di pasar global. Meningkatnya penetrasi internet di Indonesia, yang tercatat sebesar 79,5% pada tahun 2024, membuka peluang besar bagi UMKM perempuan untuk memanfaatkan platform e-commerce dan layanan fintech. Penelitian ini memperlihatkan bahwa digitalisasi memungkinkan UMKM perempuan untuk mengakses pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan yang lebih fleksibel. Hal ini sesuai dengan temuan Hilbert, 2011 yang menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan UMKM di negara berkembang, meskipun kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar. Kesenjangan digital, baik dalam hal infrastruktur internet maupun keterampilan teknis tetap menjadi penghambat bagi pelaku UMKM perempuan, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur digital yang lebih merata, terutama di daerah yang tertinggal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha perempuan memiliki akses yang sama terhadap peluang yang ditawarkan oleh teknologi.

Meskipun digitalisasi membuka peluang besar, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kesenjangan antara wilayah urban dan rural dalam akses internet dan teknologi tetap menjadi masalah besar. Di wilayah urban, di mana akses terhadap infrastruktur digital lebih mudah, banyak pelaku UMKM perempuan yang sudah memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha mereka. Namun, di wilayah rural, keterbatasan akses terhadap internet dan perangkat teknologi masih menjadi kendala yang sangat signifikan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kemampuan UMKM perempuan untuk mengakses pasar global dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing mereka. Untuk itu, kebijakan yang mempercepat pemerataan akses internet dan perangkat teknologi di daerah terpencil harus menjadi prioritas dalam upaya pemberdayaan UMKM perempuan.

Lebih lanjut, analisis terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program-program pendanaan lainnya menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memiliki niat yang baik untuk meningkatkan akses keuangan bagi UMKM perempuan, implementasi kebijakan ini sering kali terkendala oleh prosedur yang birokratis dan rendahnya pemahaman di kalangan pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Beck & Demirguc-Kunt (2006) yang menyatakan bahwa meskipun akses keuangan sangat krusial bagi pertumbuhan UMKM, banyak pelaku usaha, terutama perempuan, yang kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam memperoleh pembiayaan. Oleh karena itu, perlu ada penyederhanaan proses administrasi dalam program-program pembiayaan serta sosialisasi yang lebih luas mengenai produk keuangan yang tersedia bagi UMKM perempuan.

Selain aspek keuangan dan digitalisasi, pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam struktur organisasi UMKM juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Meskipun perempuan mengelola sebagian besar UMKM di Indonesia, representasi mereka dalam posisi strategis perusahaan, seperti direksi atau manajemen senior masih terbilang rendah. Hal ini mencerminkan adanya hambatan struktural yang menghalangi perempuan untuk memperoleh posisi kekuasaan dalam dunia usaha. Dalam hal ini, kebijakan afirmatif yang mendorong keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat manajerial menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif. Implementasi kebijakan afirmatif ini perlu diperkuat dengan pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat agar dapat memberikan dampak yang nyata dalam pemberdayaan perempuan di sektor UMKM.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan lembaga internasional menjadi elemen kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan UMKM perempuan secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan-kebijakan yang ada, perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan non-bank, perusahaan fintech, serta platform e-commerce untuk menciptakan program yang dapat membantu perempuan dalam mengakses pasar global, memperoleh pembiayaan yang fleksibel, dan mengembangkan keterampilan digital mereka. Sinergi ini akan memungkinkan terciptanya ekosistem yang inklusif, di mana perempuan UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan tumbuh di pasar yang semakin kompetitif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pemberdayaan UMKM perempuan memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Implementasi kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan literasi keuangan dan digital, serta penyediaan infrastruktur yang merata adalah langkah-langkah penting untuk mendukung pemberdayaan perempuan di sektor UMKM. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional untuk terus bekerja sama dalam menciptakan kebijakan dan program yang dapat memberikan dukungan nyata bagi UMKM perempuan, baik di tingkat nasional maupun global.

## **Kesimpulan**

Peran G20 dalam mendorong pemberdayaan UMKM perempuan di Indonesia sangat signifikan. Program G20 Empower yang berfokus pada peningkatan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam sektor swasta berhasil menciptakan ekosistem kebijakan yang lebih inklusif dan membuka akses ekonomi yang setara. Di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja sangat signifikan, dengan lebih dari 60% UMKM dikelola oleh perempuan. Dukungan yang diberikan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM perempuan turut memperkuat posisi mereka dalam perekonomian nasional.

Selain itu, digitalisasi menjadi faktor kunci yang memungkinkan UMKM perempuan untuk mengakses pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing. Penetrasi internet yang terus meningkat mendukung transformasi digital UMKM, yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan e-commerce dan layanan fintech. Namun, kendala masih muncul terkait ketimpangan digital antara daerah urban dan rural, di mana perempuan di daerah terpencil sering kali kesulitan untuk mengakses teknologi yang dibutuhkan untuk berkembang. Meskipun kebijakan yang ada sudah memadai, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan digital, serta birokrasi yang rumit dalam akses pembiayaan masih menghambat keberhasilan pemberdayaan UMKM perempuan. Representasi perempuan dalam posisi strategis di sektor bisnis juga relatif rendah, meskipun mereka mengelola sebagian besar UMKM di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM perempuan di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

Berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan, maka hal yang dapat dilakukan antara lain yakni evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program pemberdayaan UMKM perempuan guna menilai efektivitas dan dampak jangka panjang. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian, sehingga kebijakan yang ada dapat lebih tepat sasaran. Selain dari itu, untuk mengatasi masalah rendahnya literasi keuangan dan digital, disarankan untuk mengadakan program pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi perempuan pelaku UMKM, khususnya yang berbasis di daerah terpencil. Pelatihan ini perlu difokuskan pada keterampilan yang relevan, seperti pengelolaan keuangan modern, penerapan teknologi digital dalam usaha, serta cara memanfaatkan platform e-commerce dan fintech. Literasi keuangan yang lebih baik akan meningkatkan kemampuan mereka untuk memanfaatkan berbagai produk keuangan yang ada dan mengakses pembiayaan yang lebih fleksibel.

Kemudian, untuk mempercepat pemberdayaan perempuan dalam sektor UMKM, penting untuk menyederhanakan prosedur administratif dalam proses pengajuan pembiayaan, terutama dalam program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyederhanaan ini akan mempermudah perempuan untuk mendapatkan dukungan finansial yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha mereka. Selain itu, pengenalan produk keuangan yang lebih inklusif dan lebih mudah dipahami akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pelaku UMKM perempuan untuk berkembang.

Kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor bisnis juga perlu diperkuat. Untuk itu, regulasi afirmatif yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat manajerial harus diperkenalkan dan diterapkan secara lebih luas. Pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan ini akan membantu memastikan kesetaraan gender dalam struktur organisasi UMKM.

Terakhir, riset lanjutan tentang pengaruh digitalisasi terhadap UMKM perempuan sangat penting dilakukan. Penelitian lebih lanjut akan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam era ekonomi digital, serta cara-cara untuk mengoptimalkan peluang yang ada melalui teknologi. Pemerintah dan sektor swasta perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga semua pelaku UMKM perempuan, termasuk yang berada di daerah terpencil dapat memperoleh manfaat dari transformasi digital yang sedang berlangsung. Dengan langkah-langkah tersebut, pemberdayaan UMKM perempuan di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387–402. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/05%20Laurensius%20Arliman.pdf>
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47–68. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2006). Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint. *Journal of Banking & Finance*, 30(11), 2931–2943. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009>
- Brillianty, R. J. (2023). Analisis Perbandingan Politik, Ekonomi, Teknologi, Pertahanan Dan Keamanan Dan Sistem Pemerintahan 2 Negara Indonesia Dan Singapura. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 1–15. <https://doi.org/10.71040/irpia.v8i5.200>
- Hilbert, M. (2011). Digital gender divide or technologically empowered women in developing countries? A typical case of lies, damned lies, and statistics. *Women's Studies International Forum*, 34(6), 479–489. Elsevier. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277539511001099>
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>

- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *American Economic Journal: Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.  
<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jel.52.1.5>
- Nadirah, S. P., Pramana, A. D. R., & Zari, N. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)*. CV. Azka Pustaka.
- Ningsih, M., Nursini, N., & Sabir, S. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Pulau Sulawesi. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 362–372.  
<https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.696>
- Purwanza, S. W. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*. Cv. Media Sains Indonesia.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i4.2657>
- Suprayitno, D., Ahmad, A., Tartila, T., & Aladdin, Y. A. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori Komprehensif Dan Referensi Wajib Bagi Peneliti*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.